

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang mengenai negara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Islam Iran serta arti penting hubungan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok terhadap Iran. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian teoritik, hipotesa, tujuan yang akan dicapai, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan sistematika kajian.

A. Latar Belakang

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berdiri tahun 1949 setelah menumbangkan dinasti Ching (Laurence J. Brahm, 2002) yang berusia ratusan tahun. Secara konstitusi Republik Rakyat Tiongkok ditetapkan dalam kongres rakyat nasional, yang menyebutkan antara lain bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja, dalam hal ini dikelola oleh Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok sebagai inti kepemimpinan pemerintah.

Di bidang kekuasaan eksekutif, orang pertama dalam kepemimpinan Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok yang menggantikan jabatan ini adalah Ketua Partai, sedangkan Sekretaris Jenderal Partai merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat Perdana Menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres Rakyat Nasional yang didominasi oleh Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat oleh pengadilan rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Republik Rakyat

Tiongkok. Pengadilan rakyat bertanggung jawab kepada Kongres Rakyat di setiap tingkatan, namun karena perwakilan rakyat tersebut didominasi oleh Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok maka demokrasi masih sulit terwujud meskipun usaha perubahan dilakukan terus menerus dalam reformasi yang dicanangkan dalam rangka menghadapi era globalisasi.

Bentuk sistem politik domestik Republik Rakyat Tiongkok mengambil ide-ide ajaran Marxisme Leninisme. Penggunaan ajaran Marxisme Lenin digunakan semenjak tahun 1949. Berdasarkan ajaran ini, sistem pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Negara didominasi oleh partai tunggal Republik Rakyat Tiongkok yaitu Partai Komunis China (*Chinese Communist Party*). Partai inilah yang secara umum menjalankan pemerintahan dan memiliki pengaruh yang sangat kuat karena merupakan kekuatan partai tunggal dalam pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok. Lalu bagaimana dengan struktur institusi negara di Republik Rakyat Tiongkok? “*The main organs of state power are the National People's Congress (NPC), the State Council, and the President*”. (Laurence J. Brahm, 2002)

Kedudukan tertinggi ada pada *National People's Congress* (NPC) atau Kongres Rakyat Nasional, kongres yang diadakan satu tahun sekali ini akan menentukan peraturan pemerintah, undang-undang, menolak atau menerima rencana anggaran pembelanjaan negara yang diajukan dan juga memilih presiden dari Republik Rakyat Tiongkok. Presiden dalam pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok menjabat sebagai kepala negara, ia memiliki kewenangan untuk mengatur politik luar negeri. Presiden memiliki pengaruh yang besar seperti yang

dijelaskan oleh Ryser¹ “*However, since the president usually holds other key positions within the state institutions and the CCP, the prossesses immenese power*”.

Badan eksekutif dari sistem politik Republik Rakyat Tiongkok dilakukan oleh *State Council* atau Dewan Negara yang akan menyusun badan legislatif yang akan diajukan kepada Kongres Rakyat Nasional dan mengatur mengenai perihal administrasi negara secara general. Sistem politik domestik di Republik Rakyat Tiongkok menunjukkan bahwa pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok berusaha untuk tetap mewujudkan “*One China*” satu kesatuan Republik Rakyat Tiongkok, bukan Republik Rakyat Tiongkok yang terpisah-pisah.

Saat ini Republik Rakyat Tiongkok menjadi sebuah kekuatan besar yang sedang tumbuh dan siap bersaing dengan kekuatan dunia lainnya (Amerika Serikat). Para pemimpin Republik Rakyat Tiongkok adalah orang-orang yang selalu menggelorakan semangat kebangsaan. Seperti dikutip dalam pidato Hu Jintao selaku Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok pada November 2006: “pokok paling penting untuk dibahas adalah bagaimana mendefinisikan arah yang benar bagi perkembangan kebudayaan negara kita, bagaimana meningkatkan daya saing internasional, dan bagaimana memperbaiki kekuatan nasional kita”.

Memasuki abad 21 Republik Rakyat Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 7 persen pertahun. Kekuatan ekonomi suatu negara diperoleh dari pengorganisasian suatu pengetahuan dan teknologi untuk

¹ J. Brahm, Laurence, 2002, *Republik Rakyat Tiongkok Century (Abadnya Tiongkok)*, Interaksara, Jakarta. hal.307

mengeksploitasi alam yang dimiliki. Sumber yang tersedia di suatu wilayah akan menentukan kekuatan ekonomi suatu negara. Kemampuan mengeksplorasi dan memanfaatkan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat, menggunakan nilai lebihnya untuk memacu perkembangan teknologi.

Faktor yang membuat ekonomi Republik Rakyat Tiongkok tumbuh amat tinggi, menurut penyampaian Presiden Hu Jintao dalam forum tahunan konferensi Boao di Hainan adalah karena adanya aliran investasi luar dan dalam negeri yang amat luar biasa. Investasi sangat terasa industri, infrastruktur dan properti. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sangat berhati-hati menangani masalah ekonomi ini, termasuk mengatur aliran investasi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Pada awal tahun 1970-an negara-negara Barat menandatangani kontrak dengan Iran untuk membangun pembangkit listrik, tetapi setelah pembentukan Republik Islam Iran dan runtuhnya rezim Shah Iran yang merupakan polisi Barat di Teluk Persia dan kawasan Timur Tengah, maka negara-negara Barat secara terang-terangan menolak untuk bekerjasama dengan Iran. Tetapi para ilmuwan dan insinyur Iran telah berhasil mengembangkan teknologi canggih ini.

Beberapa negara Barat, setelah melihat berbagai kemajuan dalam bidang ini telah tercapai oleh para ilmuwan Iran, berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk meruntuhkan pemerintah Iran serta mencoba menghalangi aktivitas nuklir Iran. Berbagai negara Barat menuntut penghentian pengayaan uranium serta seluruh aktivitas nuklir Iran, karena mereka sadar bahwa penggunaan teknologi

nuklir akan membuat Iran mandiri secara energi dan dimungkinkan pula untuk mandiri secara persenjataan nuklir.

Alat pertama yang digunakan Barat untuk menghalangi teknologi nuklir Iran adalah Lembaga Energi Atom Internasional (IAEA) serta perundingan yang panjang dengan Iran. Republik Islam Iran telah berunding dengan Barat selama 2,5 tahun, tetapi Barat -- dengan pemberian paket yang disebut paket insentif kepada Iran -- mengharapkan penghentian seluruh aktivitas nuklir yang ditolak Iran dengan dasar keanggotaannya pada lembaga IAEA yang mengizinkan Iran menggunakan teknologi nuklir damai. Namun, dengan tujuan melakukan transparansi dan membangun kepercayaan ulang, Iran bersepakat untuk menjawab semua pertanyaan IAEA sekitar aktivitas nuklirnya dalam kerangka kerja yang dinamakan modalitas, agar isu nuklir Iran menjadi isu yang biasa bagi IAEA. Sesuai dengan modalitas, Iran telah menjawab seluruh pertanyaan IAEA dan Direktur General lembaga ini pun dalam setiap laporannya secara tegas mengatakan tidak ditemukan pengalihan apapun pada fasilitas nuklir Iran.

Pada kondisi sedemikian pula beberapa negara Barat yang seharusnya membahas masalah-masalah teknis, tetap mencoba mempolitisasikan isu nuklir Iran dan mengungkapkan beberapa tuduhan palsu dan tak berdasar agar mencegah dan menghalangi isu aktivitas nuklir Iran menjadi isu yang wajar (normal) bagi IAEA. Sekali lagi, Iran memperlihatkan niat baiknya dan pada kondisi tidak menerima dokumen apapun tentang kajian yang diduga (*Alleged Studies*) tetapi Iran tetap memberikan 200 halaman jawaban terkait isu tersebut dan membuktikan bahwa isu ini adalah palsu. Dalam usaha menunjukkan itikad

baiknya, Iran memilih untuk berdialog dengan Eropa. Dengan tujuan menyelesaikan semua isu secara menyeluruh termasuk masalah politik, keamanan, nuklir, dan lain-lain, untuk melakukan hal tersebut Republik Islam Iran telah mengajukan suatu paket usulan menyeluruh. Barat pun memberikan paket insentif baru kepada Iran. Paket insentif Barat telah dipelajari oleh Iran dan beberapa pertanyaan terkait paket tersebut telah diajukan kepada Barat, tetapi sampai sekarang Barat belum memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Tentu saja akhir-akhir ini, Solana sebagai “Kepala Perunding Negara-negara 5+1” menyatakan bahwa mereka telah memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Iran dan seharusnya mereka memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Setelah 30 tahun investasi Iran di bidang industri nuklir dan juga keanggotaannya pada IAEA, ia mempunyai hak untuk menggunakan teknologi nuklir secara damai.

Tentu saja, Iran selalu menolak menghentikan aktivitas nuklir damai. Iran telah memberikan akses yang luas kepada IAEA dan inspektornya untuk melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas nuklirnya. Iran juga tidak menggunakan teknologi nuklir dengan tujuan militer karena persenjataan nuklir, disamping haram penggunaannya, juga tidak mempunyai tempat pada doktrin pertahanan Republik Islam Iran.

Iran menjawab usaha politisasi isu nuklirnya oleh pihak Barat dengan melakukan transparansi serta membangun kepercayaan. Iran juga tetap akan

melanjutkan perundingannya sampai dapat mencapai hak sahnya atas penggunaan teknologi nuklir secara damai, serta kembalinya isu nuklir Iran ke IAEA.²

Meski hubungan ekonomi yang erat antara Republik Rakyat Tiongkok dan Iran, tahun 2010 Dewan Keamanan PBB, Republik Rakyat Tiongkok memberikan suaranya untuk memperketat sanksi terhadap Iran. Dalam hal ini masih belum diketahui sejauh mana Republik Rakyat Tiongkok dapat mendukung Iran. Kontradiksi semacam ini dapat dilihat dalam kebijakan politik Republik Rakyat Tiongkok Teluk Persia.

Pada Februari 2003, Iran mengumumkan program pengayaan uranium yang berpusat di Natanz. Iran mengklaim bahwa program pengayaan uranium tersebut akan digunakan untuk teknologi dan dengan tujuan damai. Iran justru mengundang badan PBB yang bertugas memonitoring aktivitas nuklir negara-negara di dunia, IAEA (*International Atomic Energy Agency*), untuk berkunjung ke Iran dan memeriksa aktivitas nuklirnya. Amerika Serikat adalah pihak yang melihat adanya indikasi bahwa program pengayaan uranium Iran tersebut digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir. Kemudian Amerika Serikat melaporkan kasus Iran ini kepada Dewan Keamanan PBB.

Pada November 2004, Iran menandatangani kesepakatan sementara dengan Jerman, Prancis, dan Inggris untuk menghentikan pengayaan uraniumnya. Hal ini ternyata berdampak positif bagi Iran karena dapat menghindari intervensi dari Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, IAEA menganggap bahwa Iran

² ICRO, *Iran Tanah Peradaban*, Penerbit Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Jakarta, 2009, hal. 30.

tidak memberikan laporan tentang aktivitas nuklirnya secara jelas. Masalah inipun akhirnya kembali harus ditangani oleh Dewan Keamanan PBB.

Terhitung dari tahun 2006 hingga 2008, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan 3 Resolusi yang berisi tentang sanksi terhadap Iran atas aktivitas nuklirnya. Pertama, Resolusi 1696 (31 Juli 2006), resolusi ini dikeluarkan karena IAEA tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai nuklir Iran dan Iran tidak mau melaksanakan saran-saran dari IAEA serta tetap melanjutkan pengayaan uranium. Resolusi ini dibahas ketika pertemuan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok) ditambah Jerman dan Uni Eropa di Paris pada tanggal 12 Juli 2006. Isi dari resolusi tersebut adalah bahwa Iran harus menuruti langkah yang disarankan oleh IAEA, meyakinkan bahwa nuklirnya memang untuk tujuan damai, melaporkan segala aktivitas, dan menghimbau kepada seluruh negara untuk tidak membantu Iran. Batas waktunya ditetapkan hingga tanggal 31 Agustus 2006.

Iran ternyata masih tidak mau bekerja sama dengan IAEA. Semua yang terkait dengan proses pengayaan tidak dilaporkan. Iran juga tidak melaksanakan beberapa saran yang diberikan oleh IAEA. Akhirnya, keluarlah resolusi kedua yaitu Resolusi 1737 (23 Desember 2006). Resolusi tersebut masih berisi tentang himbauan kepada Iran untuk melaporkan semua aktivitas yang berkaitan dengan pengayaan kepada IAEA, himbauan kepada semua negara untuk tidak menyuplai, menjual, atau mentransfer apapun (seperti material, bantuan dana, teknologi) yang akan berkontribusi terhadap pengembangan nuklir Iran, sekalipun ada barang-

barang yang akan diperdagangkan maka itu harus atas sepengetahuan IAEA. Batas waktu bagi Iran untuk melaksanakan isi dari resolusi ini adalah 60 hari.³

Resolusi ketiga dikeluarkan Dewan Keamanan PBB setelah Iran gagal memenuhi himbauan-himbauan yang ada di dalam dua resolusi sebelumnya.⁴ Resolusi 1747 (24 Maret 2007) menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada Iran antara lain larangan melakukan perdagangan senjata, pembekuan aset 28 orang dan organisasi yang berkaitan dengan program nuklir, permintaan terhadap negara-negara agar memberlakukan larangan bepergian (*travel ban*) terhadap pihak-pihak yang terkait sanksi. Resolusi tersebut juga menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran dengan meminta semua negara dan lembaga keuangan internasional untuk tidak membuat komitmen baru dalam bantuan keuangan atau pinjaman kepada Iran.⁵

Resolusi keempat dikeluarkan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 3 Maret 2008 yaitu Resolusi 1803. Setelah beberapa kali laporan IAEA selama tahun 2007, ternyata Iran tidak menunjukkan perkembangan untuk bekerja sama dengan IAEA. Pada 9 Juni 2010, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) mengeluarkan resolusi baru yang memperingatkan Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Resolusi bernomor 1929 (2010) tersebut menambah sanksi baru bagi Iran, karena dianggap tidak mau mematuhi resolusi sebelumnya. Ini resolusi yang kelima mengenai nuklir Iran sejak tahun 2006. Pada

³ *Resolution 1737 (2006)* [Diakses 11 Mei 2009] United Nations Security Council, S/RES/1737 (2006)

⁴ *Resolution 1747 (2007)* [Diakses 11 Mei 2009] United Nations Security Council, S/RES/1747 (2007)

⁵ Muhammad Ridhwan's Site. [Diakses 31 Maret 2009]. <<http://laisalax.multiply.com/journal/item/5>>

tahun 2006, ada dua resolusi tentang nuklir Iran, yaitu: Resolusi No. 1696 (2006) dan No. 1737 (2006). Tahun 2007, ada Resolusi No. 1747 (2007). Kemudian tahun 2008, keluar Resolusi 1803 (2008).

Dari kelima resolusi tersebut, Resolusi No. 1929 (2010) adalah yang terendah dukungannya dibandingkan resolusi lainnya. Tiga resolusi pertama (1696, 1737, 1747) didukung penuh oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Tapi Resolusi 1803 (2008) hanya didukung oleh 14 negara. Satu negara lain, yakni: Indonesia yang waktu itu menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB menyatakan abstain pada saat pemungutan suara berlangsung. Sementara itu, Resolusi 1929 (2010) hanya didukung oleh 12 negara. Dua negara, yakni: Brasil dan Turki menolak, sedangkan Lebanon menyatakan abstain. Mengapa dukungan resolusi mengenai nuklir Iran semakin menurun, padahal negara-negara Barat dengan gencar mendesak adanya sanksi yang tegas terhadap Iran? Isi dari resolusi ini kurang lebih sama dengan resolusi sebelumnya.⁶ Dalam resolusi ini, walaupun pada dasarnya telah berkali-kali Iran diberikan sanksi terkait kegiatan nuklirnya oleh IAEA, tapi Republik Rakyat Tiongkok tetap menolak memberikan sanksi terhadap kegiatan nuklir Iran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Mengapa Republik Rakyat Tiongkok tidak mendukung resolusi PBB yang memberlakukan sanksi terhadap Iran terkait isu pengembangan nuklir?

⁶ *Resolution 1803 (2008)* [Diakses 11 Mei 2009] United Nations Security Council, S/RES/1803 (2008).

C. Kajian Pustaka

Upaya mencari kebaruan kajian ini dibanding dengan berbagai kajian yang telah terdahulu, antara lain dilakukan dengan membandingkan berbagai gagasan utama kajian terdahulu. Mula pertama dipaparkan berbagai gagasan utama kajian terdahulu, setelah itu dicari berbagai perbandingan dengan kemungkinan kebaruan kajian dibanding dengan kajian ini.

1. Robert G. Sutter (2010) melalui buku berjudul *Chinese Foreign Relations, Power and Policy Since The Cold War*⁷ banyak membahas mengenai berbagai aspek politik luar negeri Republik Rakyat Tiongkok. Pada Bab 12 di halaman 297-334 secara khusus membahas mengenai “*Relations with the Middle East, Africa and Latin America*”. Artinya, Sutter membahas kawasan Timur Tengah secara umum yaitu di halaman 299-310 tanpa secara spesifik membahas kebijakan Republik Rakyat Tiongkok terhadap Iran. Kajian disertasi ini berbeda dengan telaah Sutter karena secara spesifik membahas kebijakan Republik Rakyat Tiongkok terhadap Iran sebagai salah satu negara di kawasan Timur Tengah.

2. Sam Chester, *China's Relations with the Middle East: A Bibliography, 1950-2012* (School of Advanced International Affairs (SAIS), John Hopkins University, USA, 2013). Kajian ini memaparkan semua aspek hubungan RRT-Timur Tengah di bidang energi, perdagangan, investasi dan pertukaran budaya. Kajian dibagi dalam dua kelompok yaitu sebelum dan sesudah 2001. Tahun 2001 dianggap monumental karena di tahun tersebut terdapat kejadian yang bersejarah bagi Republik Rakyat Tiongkok yaitu Peristiwa penyerangan terhadap Gedung

⁷ Robert G. Sutter, *Chinese Foreign Relations, Power and Policy Since The Cold War* (Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2010) hal. 1-17, 39-70, 297- 300.

Kembar di New York pada 11 September 2001; dan tahun dimana Republik Rakyat Tiongkok diterima sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) yang akhirnya membuka jalan bagi Republik Rakyat Tiongkok untuk melakukan perdagangan internasional secara lebih leluasa, termasuk dengan negara-negara Timur Tengah. Penelitian disertasi ini berbeda dengan kajian Sam Chester karena hanya memfokuskan kajian pada kebijakan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok terhadap Iran sebagai salah satu negara di kawasan Timur Tengah. Kajiannya juga difokuskan pada tahun 2010-2014.

3. John W. Garver (2006), melalui buku *China and Iran Ancient Partners in a Post-Imperial World*,⁸ memaparkan dinamika hubungan RRT-Iran sejak Iran dipimpin Shah atau sebelum Revolusi 1979; Revolusi 1979-1989; 1989-2004. Kajian Garver juga dilengkapi kajian kontemporer dukungan Republik Rakyat Tiongkok terhadap modernisasi militer, pengembangan ekonomi dan energi Iran di sektor riil maupun arena politik internasional. Kajian disertasi berbeda dengan kajian Garver dalam hal kewaktuan dan bidang kajian karena kajian ini hanya memfokuskan pada dukungan Republik Rakyat Tiongkok terhadap isu pengembangan energi nuklir Iran di tahun 2010-2014.

4. Rasheeda Hamid (2010), dalam jurnal berjudul *Sino-Iran Relations: Current Developments and Future Scenario*,⁹ membahas dinamika pasang surut hubungan RRT-Iran. Misalnya di awal Perang Dingin (1948-1960-an), Republik Rakyat Tiongkok berkoalisi dengan Uni Soviet bermusuhan dengan Iran yang

⁸ John W. Garver, 2006. *China and Iran Ancient Partners in a Post-Imperial World*, Donald R. Ellegood International Publications.USA

⁹ Rasheeda Hamid (2010), *Sino-Iran Relations: Current Developments and Future Scenario*. Journal of Policy Perspectives, volume 7, Number 2, January-June 2010.

dipimpin Shah dan didukung USA. Revolusi Iran 1979 tidak otomatis memperbaiki hubungan kedua negara karena penguasa baru Iran melancarkan slogan ‘tidak Barat dan tidak Timur’ dan mengkritik Republik Rakyat Tiongkok sebagai pendukung Shah. Di tahun 1980-an, tatkala pecah Perang Iran-Irak, USA dan USSR mendukung posisi Irak sehingga Republik Rakyat Tiongkok mengambil keuntungan dengan menjual senjata kepada Iran. Setelah Peristiwa WTC 11 September 2001, Republik Rakyat Tiongkok dan Iran memiliki berbagai alasan bagi peningkatan hubungan mereka di bidang diplomasi, ekonomi, politik dan militer. Kajian Hamid bermanfaat memperkaya kajian mengenai aspek ‘*take and give*’ dalam kerjasama RRT-Iran. Kajian disertasi ini berbeda dengan kajian Hamid dalam hal kewaktuan karena hanya dipusatkan pada berbagai peristiwa di tahun 2010 hingga 2014.

5. Manocher Dorraj and Carrie L. Currier, Summer 2008, melalui tulisan “*Lubricated With Oil: Iran-China: Friendly Relations in a Changing World*” pada *Journal Essay of Texas Christian University, USA*,¹⁰ secara panjang lebar memaparkan pasang-surut hubungan RRT-Iran khususnya berkenaan dengan energi tahun 1960 saat Republik Rakyat Tiongkok dipimpin Deng Xiao Ping hingga saat kontemporer (tahun 2010-an). Kajian disertasi ini berbeda dengan kajian Dorraj dan Carrie dalam hal kewaktuan karena hanya dipusatkan pada berbagai peristiwa di tahun 2010 hingga 2014.

¹⁰ Manocher Dorraj and Carrie L. Currier, Summer 2008, “*Lubricated With Oil: Iran-China: Friendly Relations in a Changing World*”. *Journal Essay of Texas Christian University, USA*. hal. 1-7

6. Agung Nugroho menulis tentang Perhatian Republik Rakyat Tiongkok di Timur Tengah pada Isu Minyak. Kebijakan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok mendukung program nuklir Iran merupakan implementasi dari sekumpulan orientasi kepentingan nasional. Pilihan kebijakan tersebut merupakan suatu langkah berani pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, sebab Iran merupakan negara yang “dimusuhi” oleh Barat sejak Iran melanjutkan program nuklirnya. Meski demikian kebijakan ini telah melalui proses kalkulasi rasional yang dianggap sebagai kebijakan strategis dalam mewujudkan keamanan energi. Konsekuensinya, Republik Rakyat Tiongkok harus berhadapan dengan kekuatan Barat dalam merealisasikan kebijakan tersebut.

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengedepankan upaya-upaya diplomasi dan politik dalam menghadapi hambatan-hambatan kebijakan strategis tersebut, baik terhadap Iran maupun negara-negara Barat. Republik Rakyat Tiongkok melibatkan diri dalam program pengembangan nuklir Iran sejak awal tahun 1990an yang meliputi penyediaan reaktor, pelatihan tenaga ahli dan pendampingan dalam pengoperasian reaktor nuklir. Sedangkan melalui Dewan Keamanan PBB, Republik Rakyat Tiongkok menjadi negara yang menolak sanksi sebagai strategi penyelesaian masalah nuklir Iran. Meski Republik Rakyat Tiongkok mendukung program nuklir Iran, tidak berarti Republik Rakyat Tiongkok oposisi terhadap Barat.¹¹

Sikap Republik Rakyat Tiongkok mendukung program nuklir Iran tidak terlepas dari faktor ekonomi. Republik Rakyat Tiongkok sejak satu dekade

¹¹ Agung Nugroho, *Dukungan Cina Terhadap Program Nuklir Iran (2006-2009)*, Jurnal Transnasional Vol. 4 No. 1 Juli 2012, hal. 15.

terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat yang mendorong besarnya permintaan energi (minyak dan gas) dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Kendala yang dihadapi pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah tidak tersedianya sumber energi di dalam negeri yang cukup, sehingga menuntut pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk mencari sumber-sumber energi di luar negeri. Dalam upaya mendapatkan sumber energi tersebut Republik Rakyat Tiongkok tidak ingin tergantung pada pasar internasional, sebab pasar energi internasional relatif sulit untuk dikontrol baik sumber, harga, maupun tingkat kontinuitas pasokan yang berarti pasar.

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok memandang kekuatan diplomasi dan kerjasama langsung dengan negara-negara penghasil energi lebih strategis dalam mewujudkan keamanan energi karena memiliki akses langsung terhadap sumber energi dan adanya jaminan pasokan dalam jangka waktu tertentu. Kuatnya diplomasi Republik Rakyat Tiongkok terhadap Iran terlihat dengan semakin kuatnya hubungan kerjasama kedua negara meskipun resolusi Dewan Keamanan PBB menghendaki negara-negara anggota PBB untuk menerapkan sanksi ekonomi dan keuangan terhadap Iran. Di tengah tekanan dunia internasional, khususnya Barat terhadap Iran, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok justru semakin meningkatkan kerjasama ekonomi dan energi dengan Iran.¹²

Teori ini mengatakan bahwa energi digunakan sebagai *means of power* dan senjata politik dalam kondisi energi di dunia yang semakin langka.¹³ Faktor yang

¹² Agung Nugroho, *Dukungan Cina Terhadap Program Nuklir Iran (2006-2009)*, Jurnal Transnasional Vol. 4 No. 1 Juli 2012, hal. 16.

¹³ Marquina, Antonio. (2009) Theory Talk #25: Antonio Marquina. *Theory Talks*, 13 Januari 2009. [Diakses 16 Juni 2009] <<http://www.theory-talks.Org/2009/01/theory-talk-25.html>>

bisa digunakan untuk menjelaskan *energy security complex* adalah ketergantungan energi. Ketergantungan energi ini memiliki beberapa derajat, yaitu ketergantungan positif (ketergantungan yang saling menguntungkan) dan ketergantungan negatif (ketergantungan yang tidak seimbang dan mengancam). Ketergantungan energi inilah yang dipolitisi atau diamankan.

Pembaharuannya adalah dari dulu hingga kini. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok memang sangat membutuhkan energi yang cukup besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negaranya. Republik Rakyat Tiongkok membutuhkan banyak sumber energi untuk meningkatkan standar kehidupan rakyatnya ke jenjang yang lebih tinggi, namun persediaan energi yang dapat dihasilkan negara tersebut tidak memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, mereka berupaya untuk melakukan hubungan bilateral dengan negara-negara penghasil energi tersebut.

Banyak dari negara-negara penghasil energi tersebut merupakan negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah di antaranya adalah Iran. Oleh karena itu, Republik Rakyat Tiongkok mulai menjalin hubungan bilateral yang cukup erat dengan Iran, guna mendapatkan dukungan sumber energi dari Iran, walaupun keputusan Republik Rakyat Tiongkok ini memberi konsekuensi yang cukup berisiko, karena Iran sendiri merupakan negara yang tidak disukai oleh negara Barat. Pada saat ini, hubungan bilateral mereka sudah sangat berkembang pesat dan telah memasuki ranah perdagangan, pertahanan, kerjasama di bidang pengembangan teknologi nuklir, dan lain-lain.

Singkat kata, Agung Nugroho lebih banyak mengupas berbagai dinamika hubungan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok dengan kawasan Timur Tengah pada isu minyak. Kajian ini bermanfaat untuk mencari berbagai pola atau keajegan perilaku politik luar negeri Republik Rakyat Tiongkok berkenaan dengan isu energi, khususnya minyak. Kajian ini berbeda dengan kajian Agung Nugroho dalam hal isu yang menjadi pokok perhatian politik Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok. Secara isu, kajian ini lebih memfokuskan politik luar negeri Republik Rakyat Tiongkok terhadap kawasan Timur Tengah, khususnya dengan Iran, tidak lagi semata-mata berkenaan dengan energi minyak namun sudah berkembang pada urusan pengembangan energi nuklir.

7. Jeffrey Reeves (2011), melalui tulisan “*Chinese Perspectives on Sino-Iran Relations*”, melakukan kritik tajam terhadap berbagai cara pandang yang selama ini dominan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pakar yang memandang politik luar negeri Republik Rakyat Tiongkok secara terlampau dangkal dan salah sasaran (*overly simplistic and counterproductive*).¹⁴ Mereka lebih melihat Republik Rakyat Tiongkok sebagai ancaman bagi kepentingan global USA dari pada memandang Republik Rakyat Tiongkok sebagai sebuah negara yang memiliki kemerdekaan menentukan gaya politik luar negerinya sebagai bagian dari masyarakat internasional dengan segala keunikan kebijakan, tujuan dan sistem nilai. Reeves menyarankan supaya USA lebih serius memandang Republik Rakyat Tiongkok sebagai bagian dari pemecah masalah dan bukannya sumber masalah serta lebih meningkatkan kerjasama dengan Republik

¹⁴ Jeffrey Reeves (2011), “*Chinese Perspectives on Sino-Iran Relations*”, Small Wars Journal, Griffith University hal. 1-13

Rakyat Tiongkok dari pada melawannya. Tulisan Reeves sangat memperkaya sudut pandang dan menarik manfaat dari kajian politik luar negeri Republik Rakyat Tiongkok terhadap Iran. Kajian disertasi ini berbeda dengan kajian Reeves karena lebih fokus pada kebijakan Republik Rakyat Tiongkok terhadap Iran dalam isu pengembangan nuklir Iran.

D. Kajian Teoritik

Disertasi ini berjudul “Politik Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Republik Revolusi Islam Iran Dalam Isu Energi.” Telaah teoritiknya antara lain dilakukan dengan mengkaji proses pengambilan keputusan luar negeri.

Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Guna mendukung penelitian ini diperlukan teori politik yang sesuai sehingga kajian ini dapat menjawab penelitian ini. Proses perilaku politik memerlukan pola-pola ulang.¹⁵ Ilmu politik diharapkan menggunakan cara-cara baru untuk meneliti gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa politik secara lebih sistematis.¹⁶ Pendekatan baru ini terkenal dengan nama “pendekatan tingkah laku.”

Pendekatan tingkah laku timbul dalam masa sesudah Perang Dunia II, sebagai gerakan pembaruan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik. Gerakan ini terpengaruh oleh karya-karya sarjana sosiologi seperti Max Weber dan Talcot Persons.¹⁷ Sarjana-sarjana Ilmu Politik yang terkenal karena pendekatan tingkah

¹⁵ Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 4.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁷ *Ibid.*

laku politik ini ialah Gabriel A. Almond (*Structural Functional analysis*), David Easton (*General System Analysis*), Karl W. Deutsch (*Communications Theory*), David Truman, dan Robert Dahl.¹⁸

Salah satu pemikiran pokok dari pelopor-pelopor pendekatan tingkah laku adalah bahwa tingkah laku politik lebih menjadi fokus daripada lembaga-lembaga politik atau kekuasaan atau keyakinan politik. Konsep-konsep pokok dari behavioralis adalah:

“Tingkah laku politik memperlihatkan keteraturan yang dapat dirumuskan, menunjuk pada tingkah laku yang relevan, mempunyai sikap terbuka terhadap konsep. Pendekatan tingkah laku memiliki beberapa keuntungan, yaitu memberi kesempatan untuk mempelajari kegiatan dan susunan politik di beberapa negara yang berbeda sejarah perkembangannya”.

Pendekatan tingkah laku mempertanyakan sistem politik apakah yang paling baik? Masyarakat bagaimanakah yang sebaiknya dituju?

Dalam setiap masyarakat terdapat nilai-nilai, norma-norma, tujuan masyarakat, dan simbol-simbol tertentu yang memungkinkan adanya kestabilan atau ketertiban. Dengan nilai, norma, tujuan dan simbol-simbol tertentu itu terwujud suatu kekhasan atau keseragaman cara hidup dan cara pikir di antara anggota masyarakat tentang segala sesuatu yang harus dan dilarang untuk dilakukan.

Dengan tatanan (*order*) itu, masyarakat yang satu dibedakan dengan masyarakat yang lainnya, Di tingkat negara bangsa (*nation-state*), tatanan nasional yang berupa norma, nilai, tujuan dan simbol-simbol adalah khas bila dibandingkan dengan negara bangsa yang lain. Dari penjelasan ini, terkesan

¹⁸ Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 6.

bahwa tatanan itu adalah suatu yang mapan atau tidak berubah-ubah. Secara sadar memang tatanan itu sifatnya stabil dan sulit berubah. Anseim Strauss (1978) menjelaskan perihal tatanan tersebut bahwa setiap masyarakat mempunyai tatanan yang disepakati bersama (*negotiated order*), sehingga dasarnya tidak ada tatanan yang permanen mutlak.

William D. Coplin secara mendalam membahas berbagai faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik luar negeri (*theory of decision making process foreign policy*) suatu negara. Menurutnya, ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi yaitu (1) Kondisi politik dalam negeri; (2) kemampuan ekonomi dan militer; dan (3) konteks internasional.

Suatu negara pasti akan memutuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan dengan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Ada beberapa aspek yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum memahami cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap sebuah isu. William D. Coplin menggunakan analisis pendekatan rasionalitas dalam bukunya, *Introduction to International Politics*.

Pendekatan rasionalitas menekankan bahwa Negara merupakan aktor untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional itu, mereka lakukan dengan mengkalkulasikan secara rasional aspek dalam kancah politik global. Pada pendekatan ini, politik luar negeri yang dilakukan oleh sebuah negara merupakan respon terhadap apa yang dilakukan oleh negara lain. Pendekatan ini mencoba menganalisis tiap respon apa saja yang akan dilakukan sebagai bentuk dari perhitungan yang rasional. Pendekatan ini disebut rasional karena

akan menghitung atau menganalisis alternatif-alternatif yang ada, mana alternatif yang paling baik dan paling tidak baik untuk dijadikan tindakan respon dalam politik luar negeri.

Menurut Coplin, untuk dapat memahami mengapa suatu negara berperilaku sejalan dengan wilayah kepentingan mereka, kita harus memahami juga mengapa atau apa yang melatar belakangi para pemimpin mereka membuat keputusan. Namun, ini akan menjadi kesalahan jika kita menganggap bahwa para pembuat kebijakan luar negeri bertindak dalam suatu keadaan yang vakum. Sebaliknya, setiap kebijakan luar negeri yang diberikan dapat dilihat sebagai hasil dari tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara pengambil keputusan. Yang pertama adalah politik dalam negeri terkait kebijakan negara-negara pengambil keputusan. Yang kedua adalah kemampuan ekonomi dan militer negara. Yang ketiga adalah konteks internasional, yakni posisi tertentu di mana suatu negara menemukan jati dirinya, khususnya mengenai hubungannya dengan negara lain dalam suatu sistem.

Tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu Negara adalah:¹⁹

a. Situasi Politik Domestik

Bahwa politik dalam negeri hanyalah seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri negara-negara. Walaupun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem itu bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu, faktor-faktor lain juga bisa

¹⁹ http://www.academia.edu/3700867/Decission_making_proses_coplin_-_model_resume

bekerja didalamnya. Kita bisa mencontohkan kepribadian pengambil keputusan atau struktur konsep internasional.

b. Situasi Ekonomi dan Militer Domestik

Maksudnya adalah suatu negara harus memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya. Termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan.

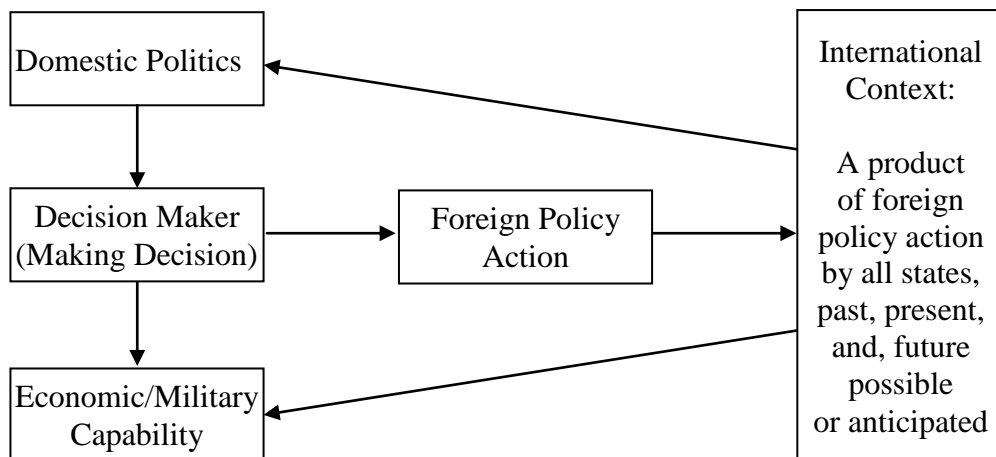
c. Konteks Internasional

Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu: geografis, ekonomis, dan politis. lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu; dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara-negara lain.

Penjelasan lebih terinci dapat disimak dengan diagram teori pembuatan kebijakan politik luar negeri, sebagai berikut:

Gambar 1.1

Diagram Konsep Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri



Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, terdapat tiga model, yaitu: *The democratic model*; *pluralist model*; atau *ruling elite model*, tapi biasanya para analisis kebijakan AS umumnya mengikuti salah satu dari tiga model tersebut.²⁰

a. *Democratic model*

Model ini berpegang bahwa suatu kebijakan itu merefleksikan pilihan-pilihan publik melalui proses pemilu dan institusi-institusi perwakilan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pandangan ini, berbagai kebijakan diformulasikan '*by the people and for the people*', dan pemerintah adalah penyambung mulut terpercaya bagi masyarakat. Namun, ada hal yang tidak terbukti dari pernyataan di atas karena banyak rakyat yang tidak ikut memilih, dan para pejabat tidak selalu punya persepsi akurat atas pilihan-pilihan publik, atau mengabaikannya sama sekali. *Democratic model* cenderung naif dan bahkan lebih sulit untuk diaplikasikan pada arena yang lebih tertutup dari *foreign policy-making* dibanding wilayah kebijakan lain.

b. *Pluralist model*

Pada model ini mayoritas publik tidak mendapat informasi, tidak tertarik, dan tidak pula aktif dalam *decision-making process*. Pengaruh mereka ada di tangan kelompok-kelompok kepentingan, masing-masing merepresentasikan satu bagian dari masyarakat. Pembuatan keputusan terdiri dari *bargaining and compromise* di antara pusat-pusat persekutuan kekuasaan. Kekuasaan terdesentralisasi, didistribusikan dalam beberapa segi, seperti kesejahteraan,

²⁰ http://www.academia.edu/3700867/Decission_making_proses_coplin_-_model_resume

pengetahuan, dan kepentingan. Di sini, mayoritas publik tidak terlibat. Model ini telah dikritik karena terlalu bersandar pada ukuran empiris dan behaviourisme, saat beroperasi di bawah asumsi-asumsi normatif yang meragukan dan tidak demokratis. Sebagaimana dalam model sebelumnya, kebijakan luar negeri kurang sesuai dalam kerangka ini dibandingkan kesesuaiannya pada kebijakan domestik. Namun, kemampuan pluralisme untuk memahami salah satu sistem politik terkomples di dunia, dan komprominya atas demokrasi ideal dan berbagai realitas politik yang keras, telah menjadikannya satu eksplanasi yang lebih populer dari yang lain.

c. *Ruling elite model*

Model ini berasumsi bahwa keberadaan elit politik yang relatif kecil dan bersatu akan menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan kepentingan-kepentingannya melalui pilihan-pilihan kebijakannya. Elit terkadang terdiri dari sedikit keluarga kaya, terkadang berbentuk apa yang disebut "*military industrial complex*", mungkin juga aktor-aktor dari kelompok yang lebih berbeda. Para elit pada dasarnya konservatif dan hanya akan menyetujui perubahan-perubahan yang menguntungkan dalam kebijakan.

Dalam pengambilan keputusan model pluralist terdapat aktor-aktor kepentingan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri disebut dengan "*policy influencers*". D. Coplin menjelaskan bahwa *policy influencer system* merupakan aktor politik domestik dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara pengambil keputusan dengan *policy influencers* terjadi secara timbal balik. Di satu sisi, pengambil keputusan membutuhkan *policy influencers* karena mereka

merupakan sumber dukungan baginya. Di sisi lain, *policy influencers* membutuhkan pengambil keputusan untuk mempermudah jalan tuntutan diputuskan sebagai suatu kebijakan. Apabila tuntutan *policy influencers* tidak dipenuhi pengambil keputusan, maka dapat dipastikan sebagian atau bahkan seluruh dukungan *policy influencers* kepada pengambil keputusan akan hilang. Pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan itu secara positif. Tetapi, para pengambil keputusan pada akhirnya akan mengakomodasi sampai batas tertentu untuk bisa mengabaikan tuntutan itu.

Coplin membedakan *policy influencers* menjadi empat macam, yakni:²¹

- a. *Bureaucratic influencer*, misalnya beberapa individu atau organisasi dalam lembaga pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Anggota birokrasi yang bertindak sebagai *policy influencer* kadang juga menjadi pengambil keputusan. *Bureaucratic influencer* memiliki akses langsung kepada para pengambil keputusan dengan memberikan informasi kepada mereka sekaligus melaksanakan kebijakan luar negeri yang diputuskan. Karenanya, *bureaucratic influencer* memiliki pengaruh sangat besar dalam pengambilan keputusan.
- b. *Partisan influencer*, kelompok yang bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis terkait kebijakan pemerintah. Mereka berupaya mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan orang-orang yang bisa berperan

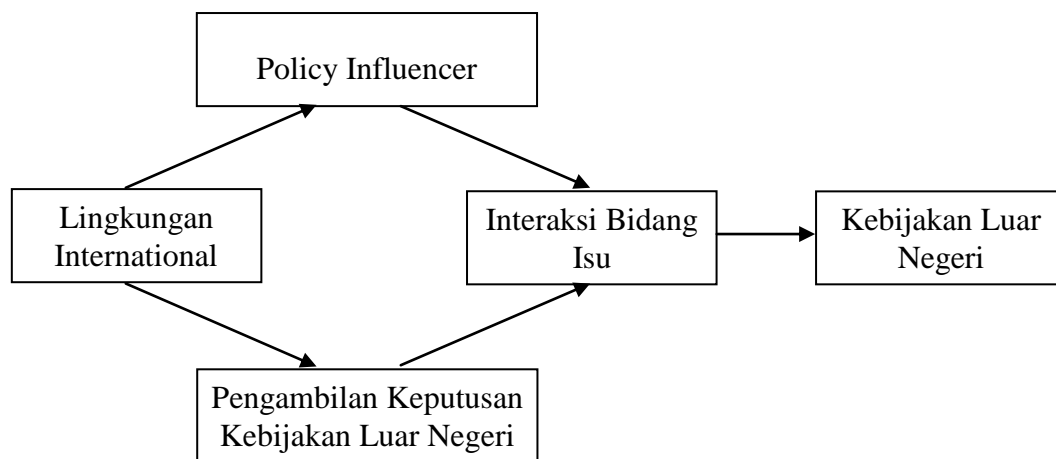
²¹ http://www.academia.edu/3700867/Decission_making_proses_coplin_-_model_resume

dalam pengambilan keputusan. Misalnya partai politik dalam sistem demokrasi.

- c. *Interest influencer*, yakni sekelompok individu yang bergabung bersama karena mempunyai kepentingan sama. *Interest influencer* memakai beberapa metode untuk membentuk dukungan terhadap kepentingannya. Mereka biasanya melancarkan kampanye dengan menulis surat yang tidak hanya diarahkan kepada para pengambil keputusan, tapi juga *bureaucratic* dan *partisan influencer*. Mereka juga bisa menjanjikan dukungan finansial atau mengancam menarik dukungan. Jika tidak berperan dalam menentukan kebijakan luar negeri, *interest influencer* pasti berperan dalam mengkritisi para pengambil keputusan kebijakan luar negeri.
- d. *Mass influencer*, yang terwujud dalam opini publik yang dibentuk oleh media massa. Para pengambil keputusan menggunakan opini publik bukan untuk membentuk kebijakan luar negeri tapi untuk merasionalisasinya. Pendapat dari kelompok ini sering menjadi pertimbangan para pengambil keputusan untuk menyusun kebijakan luar negeri.

Keempat tipe *policy influencers* itu tidak selalu memiliki pandangan sama terhadap suatu kebijakan. Perbedaan juga kerap dimiliki dengan para pengambil keputusan. Untuk menganalisis hubungan tersebut, Coplin menjelaskannya melalui Gambar di bawah ini:

Gambar 1.2
Analisis Hubungan *Policy Influencers*



Dalam model pengambilan keputusan kebijakan luar negeri ini, lingkungan internasional bertindak sebagai rangsangan bagi para pengambil keputusan serta bagi *policy influencers*. Tanda panah menyilang di atas masing-masing menunjukkan input yang diterima untuk dijadikan pertimbangan pengambil keputusan kebijakan luar negeri dan *policy influencers*. Karena perbedaan pandangan dalam melihat situasi internasional, keduanya lantas mengambil posisi berbeda dalam menanggapi satu isu. Karenanya, *policy influencers* akan berupaya mempengaruhi para pengambil keputusan melalui interaksi bidang isu yang ditunjukkan dengan tanda panah yang bertemu. Berikutnya, tanda panah lurus menunjukkan interaksi bidang isu yang berhasil melahirkan kebijakan luar negeri.²²

²² http://www.academia.edu/3700867/Decission_making_proses_coplin_-_model_resume

E. Hipotesa

Hipotesa dari penelitian ini adalah Republik Rakyat Tiongkok tidak memberi sanksi terhadap Iran terkait masalah nuklir karena pertimbangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri Tiongkok, yaitu situasi politik domestik, situasi ekonomi dan militer dalam negeri, dan konteks internasional.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui berbagai pertimbangan yang melandasi perilaku politik luar negeri Republik Rakyat Tiongkok terhadap Iran.
2. Untuk mengetahui dampak perilaku politik luar negeri Republik Rakyat Tiongkok terhadap Iran.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Teoritis, memberi informasi tentang adanya pengaruh hubungan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok terhadap Iran dan memberi peluang bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih mendalam.
2. Memberikan masukan kepada para pengambil keputusan dalam melaksanakan proses hubungan luar negeri dengan Republik Rakyat Tiongkok.

H. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian disertasi ini adalah Politik Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Iran.

I. Metode Penelitian

1. Pengertian Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu: rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. (Bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui paranormal). Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.²³

Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

²³ Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 4.

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu: yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

Penelitian yang bersifat penemuan misalnya, menemukan cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Penelitian yang bersifat membuktikan misalnya, membuktikan apakah betul bahwa insentif dapat meningkatkan prestasi kerja di unit tertentu atau tidak. Selanjutnya penelitian yang bersifat mengembangkan misalnya, mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat yang efektif.

Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.

2. **Data** kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi dan foto. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/*scoring*.²⁴

3. Macam Metodologi Penelitian

Metode penelitian kualitatif sering disebut naturalistik *setting* karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yang mengandung makna. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) sehingga hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna, dan pemahaman diperoleh melalui kata-kata atau gambar. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data yang mencakup catatan, dokumen, dan transkrip. Tekanan penelitian ada pada proses bukan hasil. Pendekatan yang dilakukan adalah studi analisis dokumenter guna mengungkap informasi-informasi yang ada dalam bidang kajian.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan

²⁴ Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 4.

data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

4. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.

Dokumen dapat dibedakan menjadikan dokumen primer (dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa), dan dokumen sekunder (jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini) contohnya otobiografi.

b. Teknik Kepustakaan/Studi Pustaka

Teknik kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melalui telaah/studi dari berbagai laporan penelitian dan buku literatur yang relevan.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan meliputi hal-hal berikut:

- 1) Diperlukan sebanyak mungkin pustaka yang relevan.
- 2) Harus tetap berpegang pada kerangka penelitian.
- 3) Diperhatikan keserasian tujuan penelitian dengan pustaka yang digunakan.
- 4) Diperlukan sumber pustaka dari penulis pustaka tersebut.

c. Teknik Analisis Isi Media Massa

Teknik analisis isi media massa adalah teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis isi media massa. Media massa dijadikan sumber untuk pengumpulan data, misalnya radio, televisi, koran, majalah, dan buletin. Berita yang dapat dijadikan data adalah sebagai berikut:

- 1) Berita yang objektif/apa adanya.
- 2) Tidak memihak sehingga tidak menyesatkan pengumpulan data.
- 3) Mengandung wawasan ilmiah.
- 4) Beritanya aktual.

Patton menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor, mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis

(ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.

Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesis menjadi: analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.

Dari uraian tersebut di atas, dapatlah kita menarik garis bawah analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan secara sistematis sehingga menjadi suatu hasil tulisan penelitian yang mudah dibaca dimengerti dan bermanfaat bagi para pembaca.

J. Sistematika Kajian

Bab I berupa pendahuluan yang antara lain membahas tentang latar belakang keberadaan negara Republik Rakyat Tiongkok dan Iran serta penting adanya pengaruh hubungan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok terhadap Iran. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kajian teoritik, hipotesa, tujuan yang akan

dicapai, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan sistematika kajian.

Bab II antara lain membahas situasi domestik RRT dan proses pengambilan keputusan. Setelah itu dilanjutkan bahasan mengenai RRT sebagai anggota tetap dewan keamanan PBB.

Bab III membahas Pertumbuhan Perekonomian RRT. Setelah itu dilanjutkan bahasan mengenai akibat pertumbuhan ekonomi RRT yang mencakup perekonomian swasta, perekonomian pasar sosialis dan peluang versus persaingan. Selanjutnya membahas Kondisi Militer RRT.

Bab IV membahas mengenai respon Republik Rakyat Tiongkok terhadap isu nuklir, dasar-dasar kepentingan politik RRT di Timur Tengah. dan konsumsi energi Tiongkok.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari kajian ini.